DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afala, La Ode Machfala. 2020. *Politik Identitas di Indonesia.* Malang: UB Press.

Anggara, Sahya. dkk. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia.

Bakrie, Surya Umar. 2020. *Multikulturalisme & Politik Identitas dalam Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.

Cangara, Hafidz. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fachrudin, Achmad. 2021. *Konflik Politik Identitas Di Pilkada DKI Jakarta 2017*, Jakarta: Literasi Demokrasi Indonesia.

Harahap, Nurhafiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing.

Mufti, 2013. *Teori-Teori Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Muhtadi, Burhanuddin. 2019. *Populisme: Politik Identitas & Dinamika Elektoral; Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural.* Malang: Intrans Publishing.

Rozi, Syafuan. Dkk. 2019. *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi*. *Keetnisan versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sari, dkk. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Sayuti, S.D. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Varma, SP. 2016. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo

Jurnal

Agus, Andi Aco. "Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia", *Jurnal Sosialisasi Pendidikan*

Sosiologi-FIS UNM.

Ardipandanto, Aryojati. 2020. "Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Vol. 11 No. 1*.

Casram. 2016. "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural", *Wawasan Jurnal Ilmiah agama dan Sosial Budaya*.

Fitriani, Sofiah. 2020. "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama", *Jurnal Studi Keislaman Volume 20, No. 2*.

Frenki, "Analaisis Politisasi Identitas Dalam Kontes Politik Pada Pemilihan Umum di Indonesia", *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Vol l1, No. 1*.

Mustika, "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial", *Jurnal Diakom | Vol.2, Desember 2019.*

Nasrudin, Juhana. 2018. "Politik Identitas dan Representasi Politik Studi Kasus pada Pilkada DKI 2018-2022", *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-agama ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1*.

Prayogo, Alfina. Dkk. 2020. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia", *Juris-diction Volume 3 Nomor 1*.

Puskapol UI, "Factsheet: Mengelola Politik Identitas Dalan Pemilu 20119", *UI – Center for Political Studies.*

Robbani, Shofa. Ahmad Fauzi. 2022. "Komersialisasi Jasa *Buzzer* Twitter Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam", *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.11, No.1.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

Artikel Daring

Andrew, Teguh V. "Pemilu Presiden 2019: Polarisasi Politik dan Komodifikasi Identitas Agama di Media Sosial". *www.indonesiana.id*. 30 April 2022. 11 Juli 2022.

CNN Media. "LSI: Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi", *www.cnnindonesia.com*. 3 November 2019. 15 April 2022.

Dihni, Vika Azkiya. "Inilah 10 Negara Dengan Pengguna Twitter Terbanyak, Ada

Indonesia?". *databoks.katadata.co.id*. 4 November 2021. 12 Desember 2022.

Effendi, Ilham. "10 Negara Dengan Pengguna Facebook Terbanyak". www.it-*jurnal.com*. 2018. 12 Desember 2022.

Fardiansyah, Achmad. "Ini Hasil Pilgub DKI Putaran Pertama". *Megapolitan.Okezone.com.* 4 Maret 2017. 26 Desember 2022.

Farwis, "Apa itu Saint League". https://jombang.bawaslu.go.id/2020/02/apa-itu-sainte-lague.html, 6 Maret 2023

https://apbd.jakarta.go.id/umum/dashboard. 11 Juli 2022.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish. 11 Juli 2022.

https://apbd.jakarta.go.id/umum/dashboard, 3 Maret 2023.

Kompas. "Label Santri 'Post-Islamime' Untuk Sandi, Asa Terakhir PKS". www.kompasiana.com. 31 Agustus 2018. 31 Juli 2022.

Kusnandar, Viva Budy. "Sebanyak 83% Penduduk DKI Jakarta Beragama Islam". *databoks.katadata.co*. 9 September 2021. 26 Desember 2022.

Kusnandar, Viva Buddy. "Apa Itu Parliamentart Trehold?". https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/apa-itu-parliamentary-threshold, 6 Maret 2023.

Lavender, Piere. "Sejarah Peristiwa Kerusuhan Mei 1998". *mediaindonesia.com*. 12 Mei 2022. 27 Juli 2022.

Populis, "Sebut Ahok Gubernur DKI Jakarta Terburuk Sepanjang Sejarah Hingga Ditiru PSI, Politisi Golkar Ini Kena Amuk", *populis.id*. 7 Mei 2022. 27 Juli 2022.

Prastiwi, Devira. "7 Hasil Kinerja Ahok yang Sempat Bikin Heboh", *www.liputan6.com*. 11 Desember 2018. 27 Juli 2022.

Situmorang, Anggun P. "Jakarta Berkontribusi 70% Dari Perputaran Uang Nasional", *www.medeka.com.* 23 Juni 2021. 11 Agustus 2022.

Sugiharto, Jobpie. "Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta". *metro.tempo.co*. 19 Mei 2022.

Yulianto, Agus. “Ini Cara Menentukan Pemenang Pilkada”, *www.republika.co.id*. 23 Agustus 2020. 18 Mei 2022

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengamat Akademik/Komisioner Bawaslu DKI Jakarta

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana politik identitas itu terbentuk pada Pilkada DKI Jakarta 2017?	Saya (pengamat) gak tau itu sebuah kebetulan atau by design, menurut saya diawali oleh pernyataan ahok tentang surat Al-Maidah 51 di pulau seribu yang bunyinya "umat islam jangan mau dibodohi pake surat Al- maidah 51". Dimana ahok sebagai seorang non-muslim seharusnya jangan pake rujukan itu, karena non-muslim pasti gak akan menang. Begitu juga melihat komposisi penduduknya islam lebih banyak, hal itu yang memicu kemunculan politik identitas. Selain itu, karena dia mengutip ayat Al quran (karena al quran itu urusan agama) untuk urusan politik. Sebenarnya hal itu (memakai ayat dalam berpolitk) bisa dikatakan wajar saja oleh kalangan muslim, tetapi dalam kasus ini non-muslim menggunakan ayat Alquran untuk melemahkan kandidat lain yang muslim. Karena di kitab agama lain juga mengharuskan memilih pemimpin yang seagama, karena tidak ada kitab suci secara explisit memerintahkan pemimpin dari agama lain. Dari pernyataan Ahok itu memicu tanggapan pro dan kontra mulai dari yang biasa saja, kampanye negatif, bahkan sampai destruktif (merusak), karena terdapat di kalangan islam menganggap urusan politik tetapi ada juga yang kontra. Tentang jumlahnya saya ((pengamat) tidak tau), maka terjadi lah benturan wacana seputar pernyataan itu dengan dalil masing-masing, maka terjadilah entry point terhadap meningkatnya suhu politik di Jakarta

	yang semakin eksplosif, jika tidak ada pernyataan konflik tetep ada tapi tidak separah itu.”
Bagaimana menurut sudut pandang bapak melihat penggunaan politik identitas itu yang akhirnya mempengaruhi pilihan masyarakat?	Menurut saya (pengamat) berangkat dari pandangan awal dimana identitas sesuatu yang dari sananya, di sisi lain bagian dari strategi politik, kalo sudah main diranah politik/kontestasi itu memang hampir dipastikan kandidat maupun tim kampanye/tim sukses menggunakan berbagai cara untuk menarik dukungan, meningkatkan elektabilitas, meraih kemenangan, dibilang pasti gak pasti karena sudah dari sananya politik identitas itu pasti berpengaruh makanya bagi mereka yang merasa terancam memberikan pandangan anti politik identitas dan buat saya itu hal yang wajar, diliat dari konteks apapun itu hal yang wajar, baik dari praktik politik maupun strategi politk itu hal yang wajar. Dan saya kira gak ada masalah dan memang bisa berpengaruh, persoalannya menggiring boleh atau tidak politk identitas itu digunakan? Dalam hal ini kan tim kampanye memetakan tentang populasi masyarakat dimana pemetaan itu untuk strategi merumuskan isu isu politk, dan salah satunya isu agama, dan itu tidak ada masalah. sebagai strategi kampanye itu tidak masalah.
Bagaimana perbandingan pengaruh politik identitas pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan Pemilihan Presiden 2019?	Dengan adanya polarisasi ditengah masyarakat, satu kelompok pendukung anies dan satu pendukung ahok. Bukan hanya berdasakan ketokohan tetapi bisa merembet kepada hal lain misalkan ketagangan hubungan antar masyarakat dan rentan terhadap kohesifitas/kebersamaan terhadap suatu bangsa. Polarisasi itu memang terlihat sangat kentara pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

	Namun pasca pilkada polarisasi itu mengalami penurunan, kalo ada di awal setahun dua tahun itu sebenarnya elite politik "merawat" itu atau bisa jadi karena ketidakpuasan di Pilkada DKI. Sementara di kalangan masyarakat sudah merasa biasa, karena kalangan elite itu hanya sekitar paling banyak 5%. Karena menurut saya polarisasi itu sangat elitis karena di masyarakat gak terlalu orang mempersoalkan perihal penggunaan politk identitas pada pemilu 2019. Ditingkat elite masih ada tetapi bersifat wacana tetapi di tingkat masyarakat sudah tidak begitu lagi.
Melihat pada aksi bela islam yang terjadi secara berjilid-jilid, nampak banyak juga anak-anak muda pada rentan usia remaja yang mengikuti aksi tersebut, bahkan ibu-ibu sampai kepada yang berkeluarga pun turut hadir, pertanyaannya ialah pengaruh politik identitas ini menyosor pada rentan usia berapa saja?	Melihat realitasnya menyasar ke semua kelompok, laki-laki, perempuan, tua, dewasa, pemuda, remaja, dan anak-anak, karena menyasar ideologi/agama karena dianggap oleh pengadilan sebagai penodaan agama. Karena jika sudah menyentuh hal-hal yang bersifat sensistif sehingga menimbulkan solidaritas kelompok. Baik dilakukan sadar maupun ikut ikutan berdasrkan solidaritas berdasarkan ikatan primordial/keagamaan. Begitu juga karena pengaruh media sosial menjadi besar sehingga masyarakat semua kalangan jadi ikutan. Ada yang spontan seperti anak anak dan terorganisisr seperti GNPF Ulama.
Apakah faktor politik identitas itu menjadi dominan atas kemenangan pasangan Anies-Sandi?	Berdasarkan survey yang saya anggap kredibel tidak menempatkan faktor agama sebagai penempatan pertama dalam memilih calon gubernur. Tetapi jangan diabaikan. Sekitar 10-20%, bisa menjadi naik peringkatnya karena momennya tepat.
Di Amerika Serikat pernah terjadi kasus Bradley Effect dimana kandidat berkulit hitam yaitu Tom Bradley	Bradley effect jika ditafsirkan dengan pilkada DKI kan intinya mengekploitasi kelemahan seseorang jadi kinerja seolah

yang seringkali unggul dalam survey, namun pada kenyataannya George Deukmejian yang berkulit putih memenangi Pemilihan Gubernur California pada tahun 1982 hal ini dikarenakan pada saat survey warga kulit putih tidak ingin terlihat rasis. Hal yang sama juga terjadi terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dimana Ahok pada Sebagian survey unggul namun kenyataannya Anies lah yang menang. Bagaimana hal ini bisa terjadi?	olah ditutupi oleh satu kasus, jika istilah itu tepat, hal itu dikarenakan slip of tongue atau dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada staff atau orang yang tidak suka, efek psikologis itu yang kemudian membuat kinerja ahok yang tegas dan disiplin akhirnya tertutupi sehingga rasionalitas orang berdasarkan kinerja akhirnya hilang begitu saja di saat terakhir karena bukan karena faktor irrasional, sehingga menjelang pemilihan itu semua kehebatan ahok terhapuskan karena kelalaian dia.
Pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, politik identitas itu kian terbentuk dan masyarakat akhirnya terpolarisasi sedemikian rupa kepada siapa mereka berpihak, bagaimana bapak melihat fenomena tersebut?	Saya kira itu biasnya masih dan tidak bisa dihindari dalam jangka waktu tertentu masih ada, hanya pemilu 2019 penerimaan orang terkait isu politik identitas sudah rasional proporsional atau sudah biasa, jadi ada pelajaran mahal juga karena contoh Basuki-Djarot yang langsung memberikan selamat dan menurunkan tensi.
Apakah politik identitas itu masih menjadi faktor dominan terhadap pemilih dalam mencoblos kandidat calon presiden dan wakil presiden?	Kalo berdasarkan pengalaman yang saya lihat itu sudah tidak menjadi faktor dominan. Politik identitas itu menjadi dominan karena adanya situasi genting yang memungkinkan, contoh di Amerika kenapa gak suka Donald Trump karena dia mengkampanyekan anti asia anti islam, membuat kebijakan yang provokatif karena jadi mengancam ekonomi amerika. Kalau tidak ada faktor genting itu politik identitas itu hanya di nomor 4 atau 5. Karena saya lihat (Pemilu Presiden 2019) tidak menjadikan agama sebagai faktor utama.
Dengan keterlibatan beberapa tokoh agama pada masa kampanye, apakah hal itu tetap menjadi panutan masyarakat untuk mencoblos pada saat itu?	Pengaruhnya masih ada hanya saja berapa besarnya itu bergantung dari kredibilitas ulama/tokoh agama. tetapi emang tidak ada larangan ustad/ulama/pendeta/biksu mengikuti kampanye selama terdaftar di kpu.

Jika dibandingkan dengan politik identitas yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu, seberapa parah pengggunaan politik identitas pada Pemilihan Presiden 2019?	Enggak terlalu. Tetapi jika ada calon nonmuslim akan ada beda lagi.
Jika memang politik identitas tidak menjadi dominan, apakah pertanda bahwa politik identitas ini hanya muncul pada masa-masa tertentu saja? Atau memang penggunaan politik identitas sebagai kampanye ini memang tidak akan menjadi andalan bagi tahun-tahun berikutnya?	Politik identitas ini menurut saya permanen artinya tetep akan digunakan sepanjang ada pemilihan terutama pemilihan presiden, gubernur, bupati, walikota, kenapa? Karena sentimen agama di Indonesia masih kuat, pemilihan berdsarkan kategorisasi agama masih ada karena berakar dari sejarah bangsa melawan kolonial, berdasarkan atas sentimen agama masih berpengaruh sampai sekarang saya berkesimplan tidak bisa hilang sampai jika merujuk pada Al-quran, tapi apakah itu menimbulkan konflik negatif deskturif atau biasa saja? Dipengaruhi faktor kandidat, apakah bisa menempatkan isu tersebut secara tepat atau enggak, kalo itu dibuat secara komoditas artinya menggunakan untuk menyerang dan menimbulkan perpecahan itu akan menjadi konflik.
Bagaimana bawaslu menangani perihal oknum-oknum yang melakukan kampanye negatif dan kampanye hitam yang menggunakan unsur identitas agama?	Saya sebagai pengamat/peneliti, pada waktu 2017 (saya masih sebagai anggota bawaslu) dia akan menahanan pelanggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi seperti itu ada laporan dari masyarakat atau penglihatan oleh bawaslu.

Lampiran 1. Wawancara Pengamat Akademik/Komisoner Bawaslu DKI Jakarta

B. Ketua Bawaslu DKI Jakarta

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana Bawaslu melihat kemunculan pilitik identitas di DKI Jakarta pada saat itu?	Kita artikan dulu politik identitas, sebagaimana kalangan akademisi menganggap politik identitas setiap pemilu itu pasti ada bukan hanya pada

	pilgub dki 2017 maupun pemilu2019, politik identitas itu menandakan “saya ini pilihan saya ini” dan itu biasa dan yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas, politisasi agama, suku, dan itu yang tidak boleh karena diatur di dalam undang-undang pemilu yaitu tidak boleh menggunakan agama, suku, ras dan antar golongan. Apakah politik identitas atau politisasi identitas itu mengganggu jalannya pemilu yang demokratis? Saya menilai pelaksanaan pilkada banyak menggunakan politisasi identitas, agama dan suku, dan itu tidak boleh kemudian merembet sampai presiden, dikarenakan dua kubu yang bersebrangan makanya kubu itu tetep berjalan. Jangan diartikan politik identitas itu melanggar karena selama itu tidak melanggar undang-undang yaitu tidak mempermasalahkan. Politik identitas agama wajar tetapi jika sudah dipolitisasi itu yang tidak wajar yang tidak boleh itu menjelek-jelekkan atau mempolitisasi/menjelek-jelekkan calon menggunakan agamanya.
Apakah Bawaslu melihat hal tersebut mempengaruhi pilihan masyarakat?	Saya belum tahu apakah sudah ada survey membuktikan bahwa politisasi agama maka pemilih mengikuti pilihannya, bahkan banyak juga orang muslim memilih ahok dan begitu juga sebaliknya (orang Kristen/non muslin memilih anies). Sebagai penyelenggara pemilu belum melihat itu, hanya kalau sudah memaksa kehendak itu tidak boleh. (Muslim harus pilih muslim nonmuslim pilih nonmuslim).
Bagaimana bawaslu melihat perbandingan pengaruh politik identitas dari sebelum kasus Ahok, setelah kasus Ahok yang juga akhirnya merember kepada Pemilihan	Kami penyelenggara pemilu tidak boleh membuat opini terkait politisasi agama, saya melihat tidak ada dampak itu, selama tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu bagi bawaslu tidak bisa melakukan

Oresiden 2019? (Dalam hal ini pengaruh Aksi bela Islam)	langkah-langkah tetapi bila sudah melanggar seperti mengintimidasi pemilih atau memaksakan kehendak, selama tidak ada pemaksaan kehendak pada aksi bela islam. Apakah ada dampak dari politisasi saya tidak bisa jawab karena tidak ada bukti signifikan karena bawaslu hanya menjaga pemilih agar bebas memilih calonnya, apakah aksi bela islam dapat menciptakan pemilih tertekan sehingga bisa membuat pemilih tertekan? Kami bawaslu tidak ada laporan. Aksi bela isalm di monas tidak ada unsur pelanggaran pemilu karena tidak ada penyampaian visi misi dari pasangan calon dan tidak ada paksaan harus memilih.
Apakah bawaslu melakukan upaya dalam meredam konflik pasca Pemilu 2019 di DKI Jakarta?	Kami tidak punya kewenangan luas terkait aktifitas masyarakat, kami hanya mengawasi ketika pemilu sedang berlangsung apabila pemilu sudah selesai maka bawaslu sudah bebas. (UU No. 7 tentang Bawaslu). Memang ada beberapa kelompok masyarakat yang menurut kami menjelekkan pasangan calon dan itu tidak boleh. Kami bisa melakukan tindakan jika ada laporan masuk atau temuan kita bisa jadikan bukti maka bisa terkena tindakan pemilu bahkan pidana. Jika bukan tim kampanye maka tidak bisa dilakukan tindakan karena yang bisa terkena hukuman ialah tim kampanye menurut undang-undang. (Peserta, pelaksana, tim kampanye)
Terkait dengan kerusushan di Bawaslu RI pada waktu itu, bagaimana tanggapan dari Bawaslu sendiri mengenai kerusuhan yang terjadi?	Kerusuhan itu hanya untuk menuntut mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Awalnya di kpu setelah itu ke bawaslu agar membatalkan hasil putusan kpu, bawaslu diminta untuk menangani pelanggaran-pelanggaran pada saat itu, kalo saya menilai karena tuntutannya

	tidak sesuai apa yang terjadi. Pelanggaran kampanye ialah politik uang yang terstruktur, masih, dan sistematis namun (mungkin) bawaslu RI tidak menemukan hasil pelanggaran itu.

Lampiran 2. Wawancara Ketua Bawaslu DKI Jakarta

C. Tim Konsultan Anies – Sandi

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana Bang Ibrahim selaku tim konsultan melihat tanggapan masyarakat (khususnya umat muslim) yang memiliki euphoria dengan penggunaan identitas agama pada waktu itu?	Kalo saya lihat saya itu waktu pilkada anies itu karena serangan media untuk menyudutkan ahok-djarot, lagipula juga masalahnya dibesar-besarkan aja, tapi dari segi agama penggunaan kata (kejadian di pulau seribu) itu salah, narasi yang dia bangun itu salah, Jakarta ini kan bukan sumatera. Penggunaan kata yang salah makanya itu yang terus menerus dihantem.
Berarti memang euphoria yang terjadi pada saat itu karena ucapan ucapan dari Ahok di pulau seribu?	Iya itu aja gak ada yang lain.
Semisal ucapan itu tidak pernah ada apakah euphoria akan sebesar itu atau biasa saja?	Ahok tuntas itu (menang), selesai di putaran pertama.
Menurut tim konsultan, apa yang menyebabkan penggunaan identitas agama islam itu akhirnya begitu terlihat?	Kalo saya lihat saya itu waktu pilkada anies itu karena serangan media untuk menyudutkan ahok-djarot, lagipula juga masalahnya dibesar-besarkan aja, tapi dari segi agama penggunaan kata (kejadian di pulau seribu) itu salah, narasi yang dia bangun itu salah, Jakarta ini kan bukan sumatera. Penggunaan kata yang salah makanya itu yang terus menerus dihantem.
Apakah dari tim konsultan memprediksi dengan euphoria umat muslim terhadap pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu?	Oh iya karena narasi itu yang selalu dibangun setiap harinya, setiap detiknya, apalagi penggunaan media sosial yang luar biasa pada waktu itu dan ada beberapa oknum yang menunggangi, politik itu berubah pada saat itu dan hasil

	kerja pun tidak akan dilihat karena kesalahan kata narasi yang dibangun bersinggungan dengan agama, karena bagaimanapun perpecahan yang terjadi bersinggungan dengan agama.
Berarti memang dari tim konsultan sudah mempunyai firasat bahwa penggunaan identitas agama ini akan meledak?	Iya, tapi pada dasarnya begini, sebenarnya itu kesalahan itu kan jauh sebelum pilkada, jadi dia belum ada lawan jadi pada saat itu lawannya umat islam, dan membuat umat islam tergerak, terbangun secara emosinya maka pola-pola itu yang dibangun bahwa kesalahan perkataan gubernur (ahok) aja, nah pas menjelang pilkada umat islam mencari sosok yang lebih baik perkataannya dan menjaga perasaan agamanya.
Pada saat itu Anies-Sandi sangat didukung oleh ormas-ormas islam yang begitu kuat, sebut saja FPI dan HTI yang keduanya sekarang menjadi organisasi terlarang, apakah dengan bantuan ormas-ormas islam tersebut mempengaruhi perolehan suara?	Sangat mempengaruhi, karena bagaimanapun atas nama ormas/masyarakat saat itu menjelang pilkada dia mencari sosok yang tegas dan santun untuk melawan petahana, karena masyarakat merasa hari itu sudah sangat meresahkan karena salah katanya gubernur, jadi sangat dibantu, akihrnya tergerak lewat ormas-ormas islam, para dai, ustad-ustad, lalu membangun isu-isu mengenai agama, lalu juga ada AHY kan yang akhirnya membuat masyarakat bisa memilih dan memilah hingga akhirnya menjadi dua putaran.
Sebenarnya apakah memang tim konsultan Anies-Sandi ini sudah merencakan untuk menggunakan identitas agama islam dalam kegiatan kampanye?	Kalo ditemen temen relawan anies sandi tidak membangun itu (identitas agama) melainkan program kerja, yang dibangun sentuhan agama ialah dari relawan yang bukan terdaftar (masyarakat Jakarta) karena gelombang sudah besar saat itu jadi berbicara identitas itu ada sebelum pilkada, baru terlihat pada pilkada dari pendukung anies padahal itu berawal dari salah kata pak gubernur (Ahok).
Jadi memang penggunaan identitas itu dari tim relawan bukan dari tim	Ya karena beritanya lebih besar, habis itu ada 212 dan itu yang terbangun

konsultan karena tim konsultan justru menggunakan program kerja?	
Akhirnya yang terbangun ini pendukung anies ini selalu menggunakan identitas agama terus?	Iya karena gak ada lagi berita yang lebih besar dari hal tersebut untuk dilawan, contoh ketika Anies-Sandi bilangnya masalah pulau reklamasi itu kalah dengan suara umat tentang kesalahan omongan gubernur ahok dan isunya kalah, jadi apapun masalahnya apapun program kerjanya pasti masuknya lingkup ke sana (identitas agama islam).
Saya mendapatkan informasi bahwa Bang Ibrahim dekat dengan mantan petinggi-petinggi fpi, bagaimana tanggapannya terkait dengan penghadangan-penghadangan kampanye pasangan Ahok-Djarot di beberapa tempat di Jakarta? Bahkan penolakan tersebut ada yang berasal dari anggota FPI.	Bukan petinggi tapi kawan-kawan. Pasti gini fpi itu kan ormas islam yang ahlussunah wal jamaah yang menganut amal maruf nahi munkar jadi ketika kepentingan mereka tidak tersalurkan oleh gubernur ahok pada saat itu maka yang ada perlawanan, apalagi pas banget kesalahan ahok saat itu (terkait al-maidah 51). Mereka melawan terus, bahkan sebelum pilkada memposisikan diri untuk melawan dan penghadangan itu bagi mereka karena sudah tidak bisa bernegosiasi lagi karena terus menerus dilawan oleh gubernur, karena sudah tidak ada titik temu antara gubernur ahok dengan fpi, makanya mereka menggunakan perlawanan secara “kasar” (penghadangan) pada saat itu.
Memasuki Pemilihan presiden 2019, nampaknya politisasi identitas agama islam mulai diterima oleh masyarakat luas, hal itu terlihat dengan pemilihan mendadak KH. Ma’ruf Amin sebagai wakil dari pak Jokowi, bagaimana bapak melihat kondisi masyarakat yang pada saat itu sudah bisa menerima penggunaan politisasi identitas agama islam?	Kalo… beda ya pilkada dengan pilpres, karena pilkada dki isunya Cuma wilayah DKI kalo pilpres ini kan mencakup wilayah yang isunya media sosial pun tidak terlalu aktif seperti di dki masih banyak masyarakat awam yang melihat ‘apa yang sebenarnya mereka (para calon) tawarkan’ jadi politk identitas pun di pilpres sangat-sangat kurang, jadi politik identitas itu akan tercipta ketika ada isu yang melawan, merusak tatanan agamanya dan itu akan terbangun kuat. Ketika di pilpres masyarakatnya beda,

	mereka lebih melihat program kerjanya, meyakinkan atau tidak, dilihat latar belakang orangnya, dilihat isu-isu sebelumnya, jadi mengapa politik identitas tidak masuk ke pilpres 2019 karena isunya tidak terbangun.
Bagaimana Bang Ibrahim sendiri dalam melihat polarisasi ditengah masyarakat itu (khusunya di Jakarta sendiri) akibat penggunaan identita agama islam yang bisa dikatakan berlebihan? Bahkan polarisasi itu masih terjadi setelah pemilu itu selesai?	Saya ngeliat gak berlebihan, jadi di tengah masyarakat sebenernya ini pemilihan biasa, Cuma memang saat persaingan pilkada namanya tim relawan abis itu tim sukses gimana caranya untuk memenangkan/mensukseskan pilihannya dengan berbagai cara, sebenarnya jika saat itu tidak ada isu agama maka yang diterima sama masyarakat adalah gubernur ahok karena program kerjanya masih diterima masyarakat dari kalangan menengah, atas, dan bawah.
Dan juga udah jelas programnya begitu?	Ya, semua program kerja bagus Cuma masalahnya program seperti apa, nah yang diterima pada saat itu ialah program kerjanya gubernur ahok tapi karena kesalahan ucapan dan itu yang menjadi masalahnya.
Berarti kalo dari bapak sendiri melihat sebenernya pilkada bahkan pilpres itu gak begitu panas?	Panas, di DKI Jakarta sangat-sangat panas karena yang dibangun pusat pemerintahan habis itu pusat ekonomi maka luar biasa reaksinya se Indonesia tapi juga gak terlalu kemana mana, masih menjaga lah, apalgi pas 212 jalanan bersih selesainya, tertib pulangnya, jadi ini mah efek aja, pilkada nya sudah selesai, mestinya tidak boleh pake isu lagi yang kedua, makanya pas mau naikin isu yang kedua kan gak kena pas di pilpres jadi antara udah dua tahun gak kena juga.
Apakah Bang Ibrahim merasakan perubahan terkait polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat pada saat itu?	Perubahan pasti ada ya karena beda orang beda kebijakan segala macem, ada temen-temen di dki di kalangan masyarakat ada yang merasa senang karena menang dan diuntungkan, ada yang tidak itu hal yang

	biasa, ya 5 tahun itu kan gak bisa merubah wajah Jakarta secara langsung tapi memang lebih adem ya, maksudnya dengan anies lima tahun menjabat habis itu juga diawasi terus menerus dari temen temen oposisi yah (pdip dan psi) maka hasil kerjanya juga cukup bagus enggak jadi full power penguasa pada saat itu.
Jadi memang kalau menurut bapak sendiri suasana saat itu di Jakarta sendiri pelan-pelan malah lebih adem gitu ya	Ya sudah mulai membaik saat itu dan gak ada masalah demonstrasi lain lain kan.
Meskipun diawal-awal masih terjadi?	Oh diawal-awal ya pasti ada perlawanan, euphoria kemenangan itu kan ya sehari dua hari bagi relawan selanjutnya balik kerumah masing-masing.
Secara umum, pemilu di Indonesia sudah sangat sering dihiasi oleh penggunaan identitas, baik identitas suku maupun agama, banyak juga calon calon kepala daerah yang memakai simbol-simbol keagamaan seperti peci pada kampanye untuk meraih suara masyarakat, tetapi mengapa penggunaan identitas agama itu begitu meledak pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu?	Karena kalau melihat begini kalo di pilgub itu banyak cara, gak bisa satu cara dan kenapa penggunaan identitas itu subur? Karena ormas islamnya juga banyak secara umum, apalagi di Jakarta, ormas islamnya banyak, habis itu penduduknya penuh, habis itu mudah dibangun pola itu, tapi lagi-lagi ketika sudah membludak (penggunaan identitas agama) nasionalis kita tinggi mas, habis itu pengaman mereka tertib.
Bisa dikatakan tingkat nasionalis tinggi itu seperti apa?	Ya ketika sudah agak merusak elite elite politik itu kan mengademi juga, ketika sudah mulai panas, elite politik mengademkan suasana, habis itu juga kepolisian-tni juga sudah mulai ngadem, jadi polarisasi nya itu pas di pilkada saja, identitas itu pas di pilkada saja, karena apapun agamanya semua pake peci sekarang pilkada gitu, kadang-kadang pake sorban, kadang-kadang masuk pesantren, jadi identitas (islam) akan dibangun ketika disatu wilayah itu masyarakatnya sangat-sangat islami.

Apa yang membuat politisasi agama islam pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu berhasil digunakan?	Jadi gini, kenapa Anies sandi menang? Karena Anies – Sandi itu yang pertama banyak silaturahminya kepada para tokoh semua unsur-unsur agama. Bukan hanya islam tapi terutama islam, yang kedua efek masalah gubernur saat itu pak ahok itu sangat luar biasa, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, jadi mau program kerjanya Cuma nanem pot dirumah itu gak ada sehebat apapun itu gak penting, karena masalah (omongan) itu diulang-ulang terus akhirnya gak ada yang berfikir program kerja, tapi setelah menang janji politik program kerjanya ditagih karena sudah selesai masalahnya, jadi dendam kesumat gitu para tokoh-tokoh agama (saya Cuma mau bilang) yang disalurkan kepada masyarakat jadilah politik identitas, karena lupa minta maaf saat itu, harusnya dia langsung minta maaf pada saat itu, karena salah dia langsung minta maaf, masalahnya kan melawan, kalo silaturahmi itu akan selesai masalahnya gak jadi politik identitas, jadi politik identitas dibangun dijakarta karena beliau juga (pak ahok) salahnya, bagi saya begitu, saya udah bertanya satu per satu, Jakarta utara, Jakarta selatan, habis itu wilayah perbatasan Jakarta timur seandainya saat itu di hari kesalahan itu waktu viral dia minta maaf, dia bersilaturahim pada semua tokoh agama karena pak ahok juga sebenernya deket temen temen muslim, dan dia minta maaf menyatakan saya salah aih selesai tuh barang, saat itu ada perlawanan masalahnya ditambah buzzer yang juga ikut melawan, relawannya kenceng melawan, akhirnya benar benar dilawan, karena pada dasarnya umat islam ini pemaaf dan sering pelupa akan sejarah begitu, dan pak anies menikmati politik

	identitas saat itu, Anies, AHY, menikmati politik identitas, bukan menggunakan politik identitas tapi menikmati.
Identitas merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir, artinya setiap manusia itu sudah ditetapkan identitasnya sejak lahir ke dunia, bagaimana bisa sebuah identitas digunakan untuk memenangkan suatu kontestasi politik?	Ya demografi kita ini kan berapa ribu pulau, berapa ratus suku, habis itu ditambah lagi berapa agama yang diakui di Indonesia, karena menjual agama didalam politik itu paling mudah, tapi itu ada berapa faktor yang memicu itu, jadi memang politk identitas itu sangat-sangat kuat di Indonesia ini, tapi lagi lagi selalu diawal pasti ada masalah, masalah dulu baru memicu dan itu penggunaan media sosial yang luar biasa kekuatannya itu terus menerus ditunggangi, makanya tokoh-tokoh yang menang karena politik identitas karena menikmati bukan menggunakan, catatan saya ialah Anies Baswedan dan AHY tidak menggunakan politik identitas tapi menikmati politik identitas, karena pada dasarnya semua calon pakai politik identitas dan menikmati politik identitas pada waktu, contoh saya muslim saya ke tokoh tokoh muslim, saya Kristen saya datang ke tokoh-tokoh Kristen, polanya begitu. Kesimpulan saya anies menikmati ada masalah politik identitas.
Bagaimana cara mengemas suatu identitas yang bersifat pribadi menjadi hal yang berpengaruh terhadap suatu kontestasi pemilihan umum ditengah masyarakat yang sangat majemuk? Bahkan dalam kasus Pemilihan Gubernur DKI 2017 dan Pemilihan Presiden 2019 bisa dikatakan berhasil memenangi kontestasi?	Kalo itu pasti melihat demografi wilayah itu yang pertama, yang kedua melihat mayoritas agamanya apa, yang ketiga pemicu masalahnya apa, lagi-lagi ketika agama apapun disinggung dan pelaku tidak meminta maaf secara cepat apalagi dalam suasana politik itu akan dipicu terus menerus, itu aja masalahnya.
Berarti karena ada kasus dulu ya?	*Yesss*, kasus dulu/masalah dulu baru bisa. Misal pesantren dibakar yang bakar umat agama lain, kalo tidak dalam suasana pemilu itu akan dibilang oknum tapi kalo lagi dalam pemilu itu pasti pake politik

	identitas dan itu luar biasa jadi tergantung situasi dan kondisinya saat itu.
Bagaimana caranya suatu identitas (dalam hal ini agama islam) di dalam satu ruang lingkup yang bermacam-macam bisa mempengaruhi perolehan suara pada saat Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu serta Pemilihan Presiden 2019?	Karena begini saat itu di pilkada DKI umat islam mencari sosok yang lawannya gubernur ahok saat itu, kalo misalnya ahok keras cari yang lembut, ahok kasar cari yang tidak kasar, habis itu ahok itu dari sumatera lawannya jawa, jadi bisa disebut anti tesa lawannya gubernur saat itu, umat islam nyari yang kek begitu, perbandingan, karena merasa tersakiti, habis itu mulai banyak penggusuran bagi masyarakat di Jakarta utara, awalnya memang seperti itu.
Berarti memang awalnya tuh bukan mencari sosok yang "agama islamnya kuat"? Justru itu bukan yang utama? Antonimnya dari pak ahok gitu lah ya	enggak. Bukan itu yang utama, karena narasi yang dibangun kan itu, setelah kita meneliti masuk ke bawah (masyarakat) ternyata bukan itu, mencari lawan antitesa nya Gubernur Ahok. *Yes* begitu.
Apakah tim konsultan memberikan batasan-batasan dalam penggunaan identitas agama islam dalam berkampanye kepada calon gubernur/presiden agar tidak menjadi gesekan dengan identitas/agama lain? Sama sekali?	Gak ada pake mas, gak pake politik identitas. Ya, saya melihat temen-temen dari konsultan tidak pake identitas pada saat itu, Cuma mempertahankan program kerja, tapi program kerja kami itu malah kalah trend sama kasus pencemaran agama saat itu, akhirnya yang terbangun yang terlihat sama pengamat politik sama orang-orang pelaku politik ini pake

	politik identitas, padahal sebenernya tidak.

Lampiran 3. Wawancara Tim Konsultan Anies – Sandi

D. Tim Konsultan Ahok – Djarot

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pendapat bapak selaku tim konsultan pada waktu itu tentang penggunaan politik identitas agama islam yang berlebihan pada Pemilihan Gubernur 2017 lalu? yang akhirnya merembet ke Pemilu Presiden 2019?	Ya kalo kita melihat berkaca pemilihan gubernur DKI 2017 jelas ada polarisasi di masyarakat antara yang mayoritas dan non mayoirtas (begitu kira-kira) dan itu dijadikan alat secara politik untuk mendiskreditkan satu dengan yang lainnya akhirnya ada negasi bahwa yang kacamata pandang ini menjadi preferensi masyarakat bahwa ini adalah islamis diluar itu adalah tidak islamis, sejujurnya dengan adanya politk identitas ini membuat masyarakat tidak rasional tidak memilih siapa yang menjadi calon yang terbaik karena pendekatannya menggunakan pendekatan secara irasional, irasional itu maksudnya saya melihat bahwa dengan adanya politik identitas ini menegasikan satu dengan yang lainnya bahwa yang ini satu soleh dan yang satu kafir, dan sebagainya, dalam kacamata politik kita tidak bisa melihat dalam satu sisi harus dari berbagai sisi salah satunya track record dan juga bagaimana situasinya,

	bagaimana rekam jejak itu yang menjadi salah satu poin unutk memilih seseorang yang kira kira ingin berlaga tapi dengan adanya ini artinya ada devide et impera ya politik adu domba dan itu sebagai alat saja pada akhirnya sehingga sesuai dengan yang terjadi di lapangan ya itulah yang terjadi di masyarakat, jadi terbelah menjadi dua itu.
Bahkan penggunaan politk identitas itu akhirnya merembet ke pemilu 2019	Jelas, jelas, jelas, karena masa dari 2017 ke 2019 kan tidak berselang lama ya sebenernya jadi dalam waktu yang dekat dan gaung pada saat ada 212 dan apalah itu dan itu kayak semacam trademark ya akhirnya dijadikan suatu alat komoditi politik begitu ya ada politisasi atau ada tricky tricky ya akhirnya itu digunakan untuk mencoba menghimpun masyarakat dalam satu lingkaran yang sama bahwa mereka punya kesamaan pandangan yang diluar itu berbeda, itu yang membuat polarisasi itu sangat terasa dan kita lihat di sosial media masyarakat saling serang satu sama lain akhirnya secara kedewasan berpolitik bahwa kita sama-sama paham bagaimana pola pemahaman dari masyarakat itu sendiri itu yang mengakibatkan tidak melihat secara rasional.
Untuk ke pemilihan presiden?	atau memang udah disetting ya untuk melihat itu karena ketika 2017 berhasil ada beberapa elite melihat ini bisa dijadikan alat sehingga dipraktekkan kembali di 2019, nah itu terlihat di pemilu 2019 jurang itu semakin terlihat sekali lebar sekali gitu ya ada gerakan gerakan politik di masyarakat ada konflik dan secara kedewasaan kita berpolitik belum mencapai itu (menghormati dan

	menghargai perbedaan politik) karena di satu sisi masyarakat mengedepanakan emosional jadi bukan melihat program dari sisi figur dan itu buat saya kurang pas dalam kita coba berbicara berbangsa dan bernegara ke depan apalagi dalam memilih "pilot" yang akan dijadikan pemimpin ke depan.
Artinya juga dibutuhkan kedewasaan dari para masyarakat untuk tokoh tokoh politk itu ya?	Ya jadikan ada berbagai elemen ketika kita berbicara politik itu ya baik itu dari calon sendiri, maupun media, maupun masyarakar, artinya kita tidak bisa salahkan masyarakat 100% karena menerima informasi dari tim maupun dari media ya kita sama sama tau media kita menggunakan sistem bad news is good news yang mana media mengabarkan hal hal yang saya fikir kurang pas ya kepada masyarakat, nah masyarakat bisa seperti karena punya preferensi , sudut pandang untuk melihat dan ditambah dari media membumbui akhirnya dapet lah situasi yang kita tidak harapkan dan tidak inginkan pada waktu itu.
Menurut tim konsultan, apa yang menyebabkan penggunaan identitas agama islam itu akhirnya begitu terlihat?	Karena ada salah satu sisi mereka bicara penistaan agama (oleh ahok) bahwa ada persepsi ahok menistakan islam dan itu membangkitkan secara emosional yang punya pemahaman sama bahwa nih islam diskreditkan dan sebagainya tapi akhirnya tidak fokus kepada penistaan agamanya tapi dijadikan alat politik untuk menyerang, menekan, menegasikan, dan membelah pada akhirnya itu, sehingga ya tadi saya sampaikan masyarakat polarisasi nya begitu kuat pada waktu itu.
Karena ucapan itu dan ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi itu?	ya, akhirnya ada komodifikasi politk ya saya menyebutnya komodifikasi politik.
Apakah dari tim konsultan memprediksi dengan euphoria umat	Sebenernya sebelum itu terjadi (kejadian Ahok) tidak, kita tidak pernah

muslim terhadap pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu?	merencanakan itu, kita merencanakan sebagaimana pemenangan seperti biasa saja pada umumnya head to head, ya kita bicara program, kita bicara campaign, kita bicara gimana track record dan sebagainya, ya pada akhirnya situasi berubah ketika statement itu terucap dan viral dan ada kemarahan atas masyarakat dan ada reaksi begitu yah itu semua berubah, kita juga agak kerepotan menangkal ini karena jika berbicara agama maka lintas itu terlewati semua, gak bisa lagi kita 'gak seperti itu', jadi akhirnya program apa semuanya jadi bias, jadi gak terlihat karena dari sisi emosional yang dikedepankan.
Kita ketahui bersama bahwa Basuki Tjahaja Purnama merupakan sosok yang bisa terbilang minoritas di wilayah DKI Jakarta, dengan serangan identitas agama islam dari kubu lawan, bagaimana tim konusltan menahan serangan-serangan tersebut?	Yah tadi kalo kita sih untuk menakar itu satu mengkalrifikasi yah, kita mengkalrifikasi statement nya pak ahok yang dikategorisasikan oleh masyarakat sebagai penista agama, hanya karena sisi emosional sudah lebih dominan maka apapun yang disampaikan ya tidak akan masuk, tetep salah, makanya pada wkatu itu kita lebih menyampaikan apasih capaian capaian sudah dilakukan pak ahok untuk menangkis sebenernya atau meminimalisir situasi yang ada sehingga masyarakat tidak terkonsentrasi ke penistaan agamanya tapi lebih ke program-progaram apa sih yang sudah dilakukan dan dicapai, berhasil atau tidak, apa indikatornya, itu sih yang kita coba lakukan sih.
Apakah tim konsultan memberikan "serangan balik" terhadap tim pemenangan lawan yang menggunakan identitas agama? (Apakah benar dengan cara menggunakan "anti" identitas agama/anti tesis)	Waktu itu kita coba membuat serangan balik terhadap kubu lawan, tapi kubu lawan ternyata membungkusnya dengan rapih sekali kita agak sulit di titik mana sebenernya untuk coba menyerang balik hanya kalo dari sisi yang lain ya kita sudah tau track recordnya pak anies seperti apa, beliau dulu Menteri

Berarti serangan balik itu lebih mengarah ke personal ya?	Pendidikan dan selesai ditengah jalan artinya tidak selesaikan tugas, entah ada faktor politik atau seperti apa, tapi secara Amanah beliau tidak menyelesaikan posisi sebagai yang semestinya yang diamatkan presiden, sebagai Menteri pendidikan, artinya kalo digantikan ada beberapa variabel, ya mungkin penyegaran terkait capaian yang belum dicapai atau memang ada "sesuatu" gitu kan (berbeda pandangan/bersebarangan) dengan pak presiden atau tidak ikut visi misi presiden, nah itu yang kita gaungkan. Ya karena serangan mereka secara personal kepada Pak Ahok jadi personal ke personal.
Memasuki Pemilihan presiden 2019, nampaknya politisasi identitas agama islam mulai diterima oleh masyarakat luas, hal itu terlihat dengan pemilihan mendadak KH. Ma'ruf Amin sebagai wakil dari pak Jokowi, bagaimana bapak melihat kondisi masyarakat yang pada saat itu sudah bisa menerima penggunaan politisasi identitas agama islam?	Sebenernya KH Ma'ruf Amin ini bukan hasil atau antitesis dari kejadian politk identitas sih karena ini hasil kompromi dari partai partai politik pengusung aja sih sebenernya, tapi ada bumbu memang yang menyebabkan ke arah sana (kenapa harus ma'ruf amin) tapi porsinya tidak dominan ya sekitar 30% lah sedangkan 70% nya berbicara tentang kompromi.
Kompromi ma'ruf amin dengan partai pengusung?	Ya. Dan pak Jokowi ingin di periodesasi kedua ini lebih stabil secara ke pemerintahan ya mungkin beliau merasa di periode sebelumnya ada "matahari kembar" gitu ya jadi ya bahasanya presiden dan wakil presiden ini kan siapa yang didepan siapa yang dibelakang artinya memang wakil presiden ini istilahnya sebagai ban serep gitu ya membantu kinerja presiden bukan setara atau sama dengan presiden gitu.
Mungkin pak jokwi bersama pak jk dia merasa ada dua begitu?	Ya betul, seperti halnya pak sby di periode pertama dengan pak JK periode kedua dengan Boediono, harusnya ada itu ya apa kilas balik lah kira-kira

	kejadian yang memang serupa lah jadi tidak dominan itu (pemilihan Ma'ruf amin sebagai wakil) bicara politik identitas.
Bagaimana Bang Reza sendiri dalam melihat polarisasi ditengah masyarakat itu (khusunya di Jakarta sendiri) akibat penggunaan identitas agama islam yang bisa dikatakan berlebihan? Bahkan polarisasi itu masih terjadi setelah pemilu itu selesai?	Cukup mengkhawatirkan ya sebenernya kondisinya yang ada sehingga tadi mungkin sudah disampaikan bagaimana polarisasi itu di masyarakat, bagaimana masyarakat itu mengkotak-kotak, bagaimana menegasikan, konflik horizontal yang di masyarakat sendiri, di media sosial juga rame, itu yang akhirnya membuat masyarakat sendiri tidak melihat sisi yang lain, sisi emosional saja yang dikedepankan bahwa yang dia pilih yang paling benar yang lain salah.
Apakah Bang Reza merasakan perubahan terkait polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat pada saat itu?	Jelas sangat terasa sekali sih, tidak hanya di media sosial, di realitas pun sama ya ada yang putus sama pacarnya, ada yang berantem sama bapaknya karena berbeda pandangan, ya saya gak tau kalo ada yang harus meninggal karena itu ya saya belum mendengar itu tapi dari sisi kehidupan bersosial menjadi konflik baik itu sifatnya personal atau organisatoris, Urusan-urusan pribadi, betul betul, jadi tidak saling kenal, yasudah jadi musuhan, buat saya berkehidpan sosial jadi tidak sehat yah.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu menimbulkan polarisasi ditengah masyarakat yang mengakibatkan pilihan masyarakat mengerucut menjadi dua pilihan pada Pemilihan Presiden 2019, dimana pendukung Ahok-Djarot berporos pada pasangan Jokowi-Amin dan Anies-Sandi berporos pada Prabowo-Sandi, apa pertimbangan yang akhirnya membuat pak Jokowi akhirnya memilih seorang kiyai terkemuka menjadi wakil untuk bertarung di Pemilihan Presiden 2019	Betul, betul, ya tadi saya bilang 30% oke karena efek politik identitas tapi 70% kompromi dengan partai pengusuh, karena tanpa kompromi juga kan tidak ada penerimaan KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden pak Jokowi.

lalu? (Sebelumnya sudah ada nama nama seperti Mahfud MD dan Airlangga Hartanto yang digadang-gadang akan menjadi wakil dari Pak Jokowi)	
Secara umum, pemilu di Indonesia sudah sangat sering dihiasi oleh penggunaan identitas, baik identitas suku maupun agama, banyak juga calon calon kepala daerah yang memakai simbol-simbol keagamaan seperti peci pada kampanye untuk meraih suara masyarakat, tetapi mengapa penggunaan identitas agama itu begitu meledak pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu?	Saya agak mengkoreksi ya kalo bicara peci itu bagian dari politik identitas, kita harus pahami nih bahwa peci itu sudah pernah dipake oleh pasukan sebagai simbolisasi nusantara, songkok, betul yah, jadi tidak diasosiasikan yang pake peci itu islam, faktanya ada beberapa orang nonmuslim juga pake peci untuk menjadi kan preferensi masyarakat ya, ya sifatnya nasional saja, hanya asosiasi memang ke arah kesana, nah ketika itu dilakukan dalam wilayah politik praktis, sebenarnya sah-sah saja dalam kerangka bahwa bisa memberikan preferensi lebih kepada masyarakat, kita tidak bisa menafikan bahwa yang islam pasti pilih yang islam, yang nonmuslim memlih yang nonmuslim sebagai perwakilannya mereka, dan itu tidak bisa dinafikan, yang tidak bisa ditolerir adalah ketika identitas itu di komodifikasi sebagai alat serang satu dengan lain itu yang tidak bisa ditolerir ya, sehingga masyarakat konflik, tidak rukun, kehilangan ruh keindonesiaan menurut saya, ke gotong royongan, bahwa kita terposo liro (bahasanya begitu kan), kita saling membantu satu sama lain itu jadi hilang, landasan-landasan itu menjadi hilang, tidak lagi menjadi dasar berbicara berbangsa dan bernegara sendiri, untuk pemilihan gubernur, walikota, dan sebagaianya karena situasi yang seperti itu, akhirnya itu yang dimanfaatkan oleh para calon-calon untuk menarik simpati dari pemilih-pemilihnya. Misal ada golongan-golongan besar di Indonesia,

	NU dan Muhammadiyah, ketika masuk NU dengan cara ini, Muhammadiyah dengan cara ini, dan itu menurut saya sah-sah saja selama ada Pendidikan politik yang diberikan.
Menurut Bang Reza selaku konsultan pasangan Ahok-Djarot, apa yang membuat politisasi agama islam pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu berhasil digunakan? (Apakah dengan keberhasilan itu membuat Tim Pemenangan Jokowi akhirnya menggunakan identitas agama islam juga pada Pemilihan Presiden 2019?)	Ya tadi adanya statement pak ahok yang dikategorisasikan sebagai penista agama itu yang membuat konflik, jadi pelajarannya adalah memang jangan singgung-singgung keyakinan, karena kalo bicara keyakinan itu akan mengalahkan segalanya ya. Apalgi di Indonesia? ya betul, apalagi di Indonesia yang secara pedoman keagamannya cukup kuat gitu ya, karena berkaca nya ya agama dijadikan pedoman hidup, ketika pedoman hidup itu ditoel dan disinggung mereka juga akan bereaksi dengan hal itu. jadi buat saya sih pelajarannya hal-hal yang bersifat keyakinan sih bisa gak ada ya sebagai salah satu alat kita mendorong adanya politik identitas, appaun yang dilakukan oleh calon itu punya efek termasuk statement nya pak ahok itu punya efek.
Sebenarnya identitas itu merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir, artinya setiap manusia itu sudah ditetapkan identitasnya sejak lahir ke dunia, bagaimana bisa sebuah identitas digunakan untuk memenangkan suatu kontestasi politik?	Pasti ada pemicunya, ada sebab ada akibta, ya politik identitas itu muncul karena ada sebabnya, sebabnya pada saat pak ahok dengan statement "penistaan agama" sehingga memicu reaksi dari masyarakat, dan tadi saya sampaikan jangan main di wilayah api lah untuk para calon-calon karena tadi bicara keyakinan semua orang punya keyakinan masing-masing kan, ketika keyakinan itu disinggung pasti akan bereaksi.
Bagaimana caranya suatu identitas yang bersifat pribadi dikemas sedemikian rupa menjadi hal yang berpengaruh terhadap suatu kontestasi pemilihan umum ditengah masyarakat yang sangat majemuk? Bahkan dalam	Kalopun kemarin tidak ada tragedi penistaan agama sebenernya tidak akan ada reaksi kesana (demo 212 dan sebagainya) jadi pengemasan politik identitas itu sah-sah saja tidak ada masalah asalkan si calon-calon

kasus Pemilihan Gubernur DKI 2017 dan Pemilihan Presiden 2019 bisa dikatakan berhasil memenangi kontestasi?	memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat.
Bagaimana caranya suatu identitas (dalam hal ini agama islam) di dalam satu ruang lingkup yang bermacam-macam bisa mempengaruhi perolehan suara pada saat Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu serta Pemilihan Presiden 2019?	Ya mungkin pendekatannya berbicara secara rasional ya, misalkan islam ya kita lebih ngedepankan rahmatan lil alamin, bahwa agama islam menjadi rahmat bagi semuanya dan dia bisa mengasosiakan ketika dia kepilih dia bisa menjadi wakil yang baik dan bisa menjadi tempat aspirasi perjuangan masyarakat gitu ya, begitu juga dengan di agama-agama yang lain sih bisa memperjuangkan kebaikan gitu ya karena kita tidak bisa hindari segala aktifitas apapun berbangsa dan bernegara tidak lepas dari aktifitas politik dan aktifitas politik mempunyai efek yang sangat signifikan merubah tatanan masyarakat, merubah peradaban dari politik lah itu menjadi salah satu alat itu kita bisa memperjuangkan kebaikan, sehingga tidak terkotak-kotak, itu islam itu Nasrani, budha, konghucu, karena yang diperjuangkan adalah kebaikan, itu yang harus diasosiasikan oleh calon calon.
Apakah pada saat itu tim konsultan (Jokowi-Ma'ruf Amin) menyarankan atau mengusulkan untuk tetap menggunakan identitas agama itu dalam berkampanye? Atau mungkin boleh namun memberikan batasan-batasan?	Enggak sih kita tidak menyarankan itu ya. Kita lebih menyarankan ke program, visi-misi, cara kerja begitu ya lebih praktis dibandingkan kita menggunakan politik identitas karena kejadian 2017 ya sebenernya kita tidak inginkan terjadi lagi namun di 2019 terjadi kejadian yang sama kalo tadi membuat Pendidikan secara rasional kepada masyarakat saya setuju bicara program, sehingga ketika terpilih dia akan tau mau melakukan apa kepada

	masyarakat ketimbang kita bicara politik identitas.

Lampiran 4. Wawancara Tim Konsultan Basuki – Djarot

DATA INFORMAN

1. Nama Informan : Achmad Fachruddin
   Pekerjaan/Jabatan : Komisioner Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta/Pengamat Akademik
   Tanggal Wawancara : 4 Agustus 2022

2. Nama Informan : Muhammad Jufri
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta
   Tanggal Wawancara : 16 Agustus 2022

3. Nama Informan : Ibrahim Isya
   Pekerjaan/Jabatan : Pengusaha Warkop/Tim Konsultan Anies – Sandi
   Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2022

4. Nama Informan : Reza Wahyu
   Pekerjaan/Jabatan : Surveyor/Tim Konsultan Ahok – Djarot
   Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2022

UNIVERSITAS NASIONAL

LAMPIRAN

Lampiran 5. Gambar 1. Bersama Bapak Achmad Fachruddin

Lampiran 6. Gambar 2. Bersama Bapak Muhammad Jufri

Lampiran 7. Gambar 3. Wawancara Bersama Bang Ibrahim Isya

Lampiran 8. Gambar 4. Bersama Bang Reza Wahyu

SKRIPSI ELMO

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	3%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
2	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	library.jakarta.bawaslu.go.id Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	www.wartamataram.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%

10	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
11	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
12	www.researchgate.net Internet Source	<1%
13	syahdi13.blogspot.com Internet Source	<1%
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
16	pdfcoffee.com Internet Source	<1%
17	repo.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1%
19	www.rikaariyani.com Internet Source	<1%
20	beritagar.id Internet Source	<1%
21	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1%

22	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
23	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1%
24	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
25	ejournal.sunan-giri.ac.id Internet Source	<1%
26	jurnal.stahds.ac.id Internet Source	<1%
27	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
28	www.kaskus.co.id Internet Source	<1%
29	www.indonesiana.id Internet Source	<1%
30	kamila29address.blogspot.com Internet Source	<1%
31	kumparan.com Internet Source	<1%
32	www.suara.com Internet Source	<1%
33	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%

34	lib.litbang.kemendagri.go.id Internet Source	<1%
35	sipeg.univpancasila.ac.id Internet Source	<1%
36	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1%
37	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
38	megapolitan.okezone.com Internet Source	<1%
39	amp.seword.com Internet Source	<1%
40	ejournal.politik.lipi.go.id Internet Source	<1%
41	newsletter.tempo.co Internet Source	<1%
42	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	<1%
43	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
44	repository.umy.ac.id Internet Source	<1%
45	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%

46	www.riauonline.co.id Internet Source	<1%
47	docplayer.info Internet Source	<1%
48	repository.universitasbumigora.ac.id Internet Source	<1%
49	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
50	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1%
51	www.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20 words
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS NASIONAL